

SERI MEMORIA PASSIONIS NO. 32

BUNYI TEMBAKAN MASIH TERDENGAR DI TANAH MEE PAGO PAPUA



*Foto aksi damai masyarakat Deiyai
Dok. Jubi/Abeth You*

LAPORAN OLEH SKPKC FRANSISKAN PAPUA

**SENTANI
AGUSTUS 2017**



BUNYI TEMBAKAN MASIH TERDENGAR DI TANAH MEE PAGO

“Kami, Gereja Katolik Keuskupan Timika menyatakan sikap: Mengecam dan mengutuk semua bentuk tindak kekerasan terhadap kemanusiaan, terutama kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain¹”

Pendahuluan

Tanah Papua kembali berduka. Masih di Tanah Mee Pago, penembakan 8 Desember 2014 yang belum terselesaikan, kini terulang lagi di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017. Satu orang Yulianus Pigai dipaksa untuk menemui ajalnya, sedangkan kesepuluh temannya masih dirawat dan berjuang untuk mendapatkan kehidupannya. Bukan suatu kejadian yang asing kepada masyarakat di Papua. Kita bisa melihat beberapa kejadian sebelumnya dan sesudahnya yang serupa seperti penembakan pada 26 Juni 2015 di Ugapuga (Kabupaten Dogiyai), 17 Juli 2015 di Bilogai (Kabupaten Intan Jaya) dan pada 28 Agustus 2015 di Koperapoka (Kabupaten Mimika). Dan yang baru lagi, pada 9 Agustus 2017 di Paomako (Kabupaten Mimika), bunyi tembakan terdengar lagi. Seorang warga sipil Theo Camtar harus dan dipaksa menemui ajalnya.

Kejadian 1 Agustus 2017 di Kampung Oneibo, Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai menambah cerita kelam dan terus membangkitkan ingatan, *memoria passionis (ingatan penderitaan)*, akan segala kejadian penembakan yang terjadi di Tanah Papua. Ke-ego-an pihak perusahaan PT Putra Dewa Paniai yang tidak memberikan jasa angkutan menjadi awal mulanya kejadian tersebut. Perdebatan yang berujung pada ‘kerja sama’ antara PT Putra Dewa dan aparat keamanan kiranya memberikan catatan semakin buruknya kehadiran para investor, pembangunan infrastruktur dan pendekatan keamanan di Tanah Papua.

Melihat kembali kejadian di Kampung Oneibo, 1 Agustus 2017, Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua perlu menyuarakan keprihatinannya. Peristiwa ‘kesakitan’ yang terus terjadi seperti penembakan dan konflik di Tanah Papua sepertinya memberikan gambaran kepada publik bahwa Tanah Papua belum mencerminkan perdamaian.

Kronologis dan catatan refleksi serta rekomendasi yang digambarkan di dalam laporan ini kiranya membantu semua pihak untuk melihat secara jernih kejadian di Kampung Oneibo².

¹Pernyataan sikap Gereja Katolik Keuskupan Timika yang dikeluarkan oleh Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr pada 4 Agustus 2017, lihat. <http://fransiskanpapua.org/2017/08/05/pernyataan-uskup-timika-mgr-jhon-philip-saklil-pr-penembakan-di-deiyai/>

²Kami berterima kasih atas segala masukan yang kami dapat dari teman-teman SKP se-Papua sewaktu menyusun laporan ini.

Bagian I: Suasana serta Kronologi Penembakan di Kampung Oneibo, 1 Agustus 2017

A. Laporan awal

Laporan awal berasal dari Gakou Kaa Piniibo, yang sempat mencatat cerita dari saksi mata. Dia menceritakan suasana awal peristiwa ini maupun inisialnya perkembangan selanjutnya dan berita mulai beredar di media sosial sebagai berikut:

Deiyai - Tujuh Orang warga Sipil Deiyai ditembak oleh Polisi Satuan Brimob Polres Paniai, pukul 17.45, Selasa, (1/08) di Oneibo, Tigi Selatan, Deiyai.

Menurut saksi mata, PE, berikut kronologinya, sekitar pukul 16.30, (01/08), ada seorang warga, Ravianus Douw (24), tenggelam di kali Oneibo. Korban berhasil diselamatkan oleh warga setempat dlm kondisi kritis. Warga setempat memohon bantuan kendaraan kepada Pihak Perusahaan yg sedang membangun Jembatan Kali Oneibo untuk dilarikan ke Rumah Sakit. Namun pihak Perusahaan tidak menggubris. Sehingga salah seorang warga harus ke Waghete untuk memanggil kendaraan yang jaraknya cukup jauh, kira2 10 Km. Setelah dilarikan ke RSUD Madi, nyawa korban tidak tertolong. Menurutnya, lambatnya penanganan medis yang disebabkan oleh jarak dan waktu membuat korban tidak terselamatkan. Lanjutnya, Jika Pihak Perusahaan membantu cepat, nyawa korban dapat diselamatkan dengan bantuan medis.



Tidak adanya niat membantu dari pihak Perusahaan, membuat warga sekitarnya mengamuk dan membongkar camp perusahaan. Selang beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 17.45 (01/08), pasukan bersenjata lengkap dari satuan Brimob Polres Paniai turun ke lokasi dan membubarkan paksa masa warga sekitarnya dengan tembakan timah panas.

B. Laporan dilengkapi selama hari-hari berikut³.

I. Hari, tanggal: Selasa, 1 Agustus 2017

II. Tempat Kejadian: Kampung Oneibo, Distrik Tigi Selatan, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua

III. Kronologis:

Pada Selasa, 1 Agustus 2017:

- **Pukul 07.30 Wit**, beberapa warga dari Kampung Oneibo pergi ke kali untuk mandi dan menangkap ikan. Kali tempat mereka mandi berdekatan dengan proyek pembangunan Jembatan oleh PT Putra Dewa Paniai. Salah satu dari masyarakat Kasianus Douw tenggelam di Kali Oneibo. Melihat itu, teman-temannya berusaha menyelamatkan Kasianus. Setelah berhasil menyelamatkan Kasianus, salah satu dari mereka meminta bantuan ke salah satu karyawan PT

³Laporan yang menjadi pegangan utama kami adalah laporan yang diterbitkan oleh KPKC Kingmi di Tanah Papua dan laporan oleh SKP Keuskupan Timika.

Putra Dewa Paniai yang sedang mengerjakan jembatan. Mereka meminta bantuan mobil untuk membawa temannya Kasianus ke Rumah Sakit. Dalam percakapan, karyawan itu menolak untuk memberikan jasa angkutan. “*Saya bisa bantu tetapi di dalam perjalanan kalau terjadi apa-apa nanti masyarakat persalahkan saya jadi saya tidak mau bantu*”.

Salah satu dari antara teman korban mencari bantuan mobil di Terminal Waghete.

- **Pada pukul 10.30 Wit**, setelah bantuan mobil tiba, mereka mengantar Kasianus ke Rumah Sakit Uwibutu. Namun di dalam perjalanan Kasianus Douw meninggal. Teman-teman Kasianus tetap membawanya ke RSUD Uwibutu untuk diperiksa. Setibanya di rumah sakit, salah satu dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa Kasianus sudah meninggal dalam perjalanan tadi. Dampak penolakan dari salah satu karyawan PT Putra Dewa Paniai menghasilkan kemarahan dari warga setempat di Kampung Oneibo. Masyarakat yang terdiri dari usia anak-anak dan pemuda ke camp PT Putra Dewa Paniai. Masyarakat merusak camp tersebut.
- **Pukul 13.30 Wit**, jenazah Kasianus dibawa ke rumahnya di Kampung Oneibo. Beberapa orang (usia anak-anak dan pemuda) ke camp perusahaan dan merusak tenda perusahaan.
- **Pukul 14.00 Wit**, dua anggota Brimob lengkap dengan senjata dan seorang karyawan PT Putra Dewa ke lokasi kejadian. Masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian mengusir ketiganya untuk pulang. Ketiganya kembali ke arah Waghete.
- **Pukul 15.20 Wit**, Purnawirawan TNI Elias Pakage dan Philipus Pekei berencana ke Kantor PT Putra Dewa di Tigido dengan maksud menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Keduanya menelpon Kepala Kampung Oneibo, Kepala Suku dan seorang tokoh masyarakat untuk bersama ke Kantor PT Putra Dewa. Di dalam perjalanan, tepatnya didepan SD Inpres Bomou mereka bertemu dengan satu buah mobil patroli Brimob, satu buah mobil patroli Polsek dan satu truk yang memuat para karyawan PT Putra Dewa. Karena melihat itu, Elias Pakage, Philipus Pekei dan seorang tokoh masyarakat itu kembali ke Oneibo. Mobil PT Dewa dan 1 truk para karyawan parkir di tempat kosong tidak masuk ke lokasi proyek. Sedangkan mobil Patroli Brimob langsung masuk lokasi proyek. Karena melihat banyak masyarakat (mayoritas anak muda) sehingga Mobil Brimob parkir di tikungan kurang lebih 20 meter dari camp. Dari tikungan itu Brimob BKO Polda beraksi. Sebanyak 6 anggota Brimob turun dari mobil. Mereka ke camp perusahaan dan ‘mencari gara-gara’ kepada anak-anak dan pemuda-pemuda.
- **Pukul 16. 25 Wit**, Anak-anak dan pemuda-pemuda spontan mengambil batu, kayu dan 1 orang bawa panah mengusir Brimob. Kepala Kampung Oneibo Anton Pekey mengamankan kedua belah pihak. Namun anak-anak dan pemuda-pemuda tetap mengejar Brimob. Sepertinya Brimob ‘memancing’ anak-anak sampai di sebelah jalan, yang tidak ada perumahan masyarakat. Di situlah Brimob mulai melakukan penembakan. Pada kesempatan itu, Kepala Kampung Anton Pekey mengangkat tangan dan mengatakan agar tidak usah menembak



Foto evakuasi korban
Dok. Jubi/Abeth You

dan mengajak untuk menyelesaikan secara damai. Namun Brimob tetap melakukan penembakan.

- **Pukul 17.15 Wit**, setelah melakukan penembakan dan mundur, masyarakat mengusahakan mobil untuk mengangkut korban tembakan ke RSUD Waghete. Korban Yulianus Pigai ditandu oleh masyarakat.

IV. Korban:

1. Yulianus Pigai (27 thn): Luka tembak kedua paha dan bagian bawa perut. Meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD Waghete.
2. Delian Pekei (20 thn): Luka tembak di pipi Kanan, lengan, paha bagian kiri. Dokter menemukan 8 butir peluru di tubuhnya. Dievakuasi ke RSUD Nabire, dilanjutkan ke RSUD Dok II Jayapura.
3. Yohanes Pakage (29 thn): Luka tembak betis bagian kanan, tulang kaki bagian depan kak hancur.
4. Albertus Mote (11 thn). Siswa Kelas 6 SD: Luka tembak di pinggang. Dirawat di RSUD Waghete.
5. Esebius Pakage (14 thn): Luka tembak tangan kanan dan kiri
6. Yunior Pakage (15 thn), Kelas 2 SMP: Luka tembak telapak kaki kiri tembus dari kanan ke kiri. Dirawat di Wahgete, lanjut di RSUD Nabire.
7. Amos Pakage (27 thn): Luka tembak kaki kanan. Berobat sendiri.
8. Marius Dogopia (21 thn): Luka tembak bagian pantat. Dirawat di RSUD Uwibutu, lanjut di RSUD Nabire.
9. Penias Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP: Luka tembak bagian betis.
10. Titus Pekei (30 thn).
11. Meky Pakage (14 thn), siswa kelas 2 SMP: Luka tembak di tangan kanan. Dirawat di RSUD Waghete
12. Martinus Pekey (51 thn): Tidak terkena tembakan. Sedang sakit tetapi mendengar bunyi tembakan, kaget dan meninggal di tempat.

V. Pelaku: Brimob BKO Polda Papua

VI. Barang Bukti: selongsongan peluru, bekas luka tembak

VII. Kelanjutan peristiwa

- **Tanggal 2 Agustus 2017**, mayat Yulianus diantar ke Mapolsek Waghete
- **Tanggal 3 Agustus (pkl. 10.00 Wit)**, Kasat Brimob Polda Papua berkunjung ke Waghete dan bertemu dengan masyarakat Deiyai. Saat itu Kasat Brimob mengatakan, *“mari kita jaga kedamaian di Kabupaten Deiyai, kita tidak boleh dengar provokator yang menghancurkan kita. Anak buah kami yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat, kami berjanji tetap lakukan proses hukum”*.
- **Tanggal 4 Agustus 2017 (pkl.09.00 Wit)** Jenazah Yulianus Pigai dibawa ke Oneibo dari Kantor Mapolsek Waghete. Pukul 11.30 Wit, Yulianus Pigai dimakamkan di samping rumah keluarganya

C. Tanggapan Awal Masyarakat:

- Anak-anak yang ditembak ini tidak pernah buat kesalahan terhadap Negara NKRI tetapi mereka ditembak dengan alat Negara
- Keluarga dan masyarakat minta Barang Bukti kesalahan masyarakat Oneibo kepada pihak kepolisian.
- Yulianus Pigai ini Brimob yang tembak maka Brimob yang kuburkan.



Foto aksi damai masyarakat Deiyai
Dok. Jubi/Abeth You.

- Sekarang ini kami sangat benci TNI/POLRI dan negara ini karena mereka ini yang menembak kami terus kami salah apa. Mungkin kami kulit hitam dan rambut keriting itu yang kamu bunuh-bunuh kami terus.
- Masih pada tanggal yang sama, pukul 10.00 Wit, pemuda-pemuda melakukan pemalangan di Gunung Iyadimida sebagai bentuk protes masyarakat Papua terhadap Aparat Brimob.

Bagian II: Tindakan dan tanggapan lanjut

Beberapa jam setelah kejadian, berita dan informasi penembakan tersebar di media. Laporan awal tentang kejadian terus dikirim ke beberapa group Whatsapp dan disebarluaskan. Di beberapa media lokal, nasional dan internasional mulai memberitakan kejadian tersebut. Suara dari negara (pihak kepolisian dan Menkopolkam), tokoh gereja, pimpinan Gereja Katolik Keuskupan Timika, para legislatif di Papua, Komnas HAM, tokoh masyarakat, para aktivis, memenuhi rubrik berita cetak dan online beberapa hari kemudian.

A. Tanggapan dari tokoh Gereja-Gereja:

- Pada 4 Agustus 2017, Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil Pr. mengeluarkan pernyataan sikap mewakili Gereja Katolik di Keuskupan Timika. Dengan sangat jelas dan bernada keras Uskup John mengutuk penembakan tersebut.



Foto aksi 1000 lilin untuk Deiyai
Dok. Fr. Andika, OFM

“Dengan kekerasan bersenjata dan secara khusus atas kasus penembakan

masyarakat sipil di Oneibo Kabupaten Deiyai, kami, Gereja Katolik Keuskupan Timika menyatakan sikap: mengecam dan mengutuk semua bentuk tindak kekerasan terhadap kemanusiaan, terutama kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Mengecam dan mengutuk semua bentuk tindak kekerasan terhadap kemanusiaan yang menggunakan alat negara untuk menyerang dan menghilangkan nyawa warga masyarakat sipil⁴”

- Bernada yang sama, Ketua Sinode Gereja Kingmi Tanah Papua Pdt. Benny Giay mengeluarkan surat gembalanya. Dalam suratnya, Pdt. Benny mengangkat lagi kejadian-kejadian sejenis di tahun-tahun sebelumnya. Persoalan penembakan dan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak pernah terselesaikan. Selain mengajak kita untuk mengenang persoalan-persoalan tersebut, Pdt. Benny juga mempertanyakan peranan dari para pejabat daerah, pemerintah daerah di Papua, khususnya Bupati Deiyai yang jarang berada di tempat tugasnya. Mengkritisi pemerintah dan mengutuk sikap aparat keamanan tidaklah cukup di dalam surat gembalanya. Pendeta Benny Giay mengkritisi juga peranan Gereja di Tanah Papua.

⁴Pernyataan sikap Gereja Katolik Keuskupan Timika oleh Uskup Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr, lihat. <http://fransiskanpapua.org/2017/08/05/pernyataan-uskup-timika-mgr-jhon-philip-saklil-pr-penembakan-di-deiyai/>

“Gereja KINGMI menilai hal ini terjadi merupakan kombinasi dan akumulasi dari banyak faktor. Sebagian dikarenakan kegagalan pembinaan gereja yang terlalu sibuk mengurus ajaran murni, kader gereja yang etika sosialnya rendah, bupati dan para pejabat yang tidak bertanggung jawab, elit masyarakat yang menutup mata terhadap dosa para pejabat itu serta aparat yang ‘menyembah’ kekuatan modal”

- Salah satu tokoh Papua Pastor Neles Keadabi Tebay Pr, koordinator Jaringan Papua Damai (JDP), juga mengajak publik untuk melihat beberapa kejadian kekerasan lainnya pada tahun 2017 di wilayah yang sama. Kejadian di Kabupaten Dogiyai (20/1/2017), aparat kepolisian menyiksa beberapa warga dan pada 10 Januari 2017, seorang warga meninggal karena dipukul oleh aparat kepolisian. Di wilayah Papua lainnya seperti di Wamena, Merauke, Boven Digoel dan Intan Jaya, penembakan dan kekerasan dari aparat kepolisian terus terjadi. Alat Negara yang bertugas untuk melindungi selalu beralihfungsi untuk menghabiskan warganya. Di dalam pernyataannya, Pastor Nelis mengatakan segala pengalaman ‘kesakitan’ tersebut terus membangkitkan sikap antipati dari masyarakat Papua akan kehadiran Negara di wilayahnya.

“Ketika kekerasan negara terus dilaksanakan, nasionalisme Indonesia – sekalipun dikampanyekan melalui berbagai media dan kegiatan – sulit bertumbuh dalam hati orang Papua, terutama pada para keluarga yang menjadi korban kekerasan negara. Bagaimana mungkin orang Papua diharapkan mencintai Indonesia, ketika pada saat yang sama mereka dipandang sebagai musuh negara dan dihadapi dengan tindakan kekerasan yang dilakukan aparaturnegara? Tambah lagi, orang Papua mengetahui bahwa Pemerintah belum mempunyai komitmen moral dan politik untuk menyelesaikan tiga kasus pelanggaran HAM berat yakni Kasus Wasior (2001), Kasus Wamena (2003), dan Kasus Paniai (2014)”⁵

B. Tanggapan dari pihak yang berwajib.

- Dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli Ahmad mengatakan bahwa Kapolres Paniai akan ‘dicopot’ dan pasukan Brimob yang bertugas akan ditarik dari Deiyai. Dari satuan Brimob Polda Papua melalui Direskrimum Polda Papua Kombes Pol. Henry Simanjutak, Sabtu (5/8) mengakui bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh anggotanya. Pernyataan dan sikap yang harus diapresiasi oleh publik⁶.

“Kasat Brimob juga sudah mengaku bahwa yang menembak itu anggotanya, berarti itu sudah terbuka. Mari kita bekerja bersama agar prosesnya segera selesai”

Pada tanggal 11 Agustus 2017, melalui media CNN Indonesia, Kapolda Papua Irjen Pol. Boy Rafli mengatakan bahwa Kapolsek dan 8 anggota Brimob telah melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan aksi massa.

⁵Pernyataan yang disampaikan oleh Pastor Neles Keadabi Tebay, Pr di media www.satuharapan.com

⁶Apresiasi ada, namun disertai keraguan. Proses yang sama sempat terjadi pada penembakan di Paniai, 8 Desember 2014. Penarikan pasukan tidak menyelesaikan kasus dan membuat jerah kasus penembakan yang terjadi di Papua. Selanjutnya, pelakunya diproses memakai jalur hukum kode etik kemiliteran bukan ke jalur hukum kasus berat seperti yang sementara didorong oleh sebagian solidaritas untuk korban Deiyai.

- Berbeda dengan pihak kepolisian, Bupati Deiyai Yance Takimai, di Waghete, Rabu (9/8), mengatakan bahwa pelakunya harus dihukum sangat berat.

“Saya sebagai Kepala Daerah Deiyai perintahkan pelakunya harus dihukum sangat berat. Tidak boleh ada ampun⁷”

- Hampir sama dengan Bupati Deiyai, Ketua DPR Papua Yunus Wonda sepertinya agak pesimis terkait penyelesaian kasus penembakan ini. Yunus bercermin pada proses penyelesaian kasus Paniai, 8 Desember 2014. Pelakunya sampai saat ini belum diproses.

“Kami akan kirim tim untuk mengumpulkan data-data dan mencari tahu kronologis di lapangan. Jadi tidak mungkin lagi, karena mereka yakin pelaku tidak akan pernah diproses, misalnya kasus Paniai sampai kini tidak ada penyelesaian⁸”

- Dari perwakilan rakyat Deiyai, DPR Kabupaten Deiyai menuliskan sebuah surat yang dikirim ke Polda Papua. Di dalam surat tersebut pihak DPR Deiyai meminta agar pihak Polda Papua dapat melakukan proses hukum para pelaku penembakan dan menarik pasukan Brimob dari Deiyai serta mendesak ke Bupati Deiyai untuk mencabut izin usaha PT Putra Dewa Paniai di Deiyai⁹.

C. Tanggapan lanjut dari Masyarakat Umum

- Setelah berbagai tanggapan di beberapa Media (cetak maupun online), solidaritas untuk korban penembakan di Deiyai bergerak dengan berbagai aksi di seluruh wilayah

Papua, maupun di luar Papua. Aksi demo damai oleh masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Papua di Manokwari melakukan aksi damai di Mabes Polda Papua Barat (4 Agustus), Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat Papua-Peduli



*Foto penandatanganan kesepakatan
Dok. Jubi/Abeth You.*

HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) di halaman kantor DPR Papua, Minggu (6 Agustus), lapisan masyarakat yang dimotori oleh BEM Uncen dan Organisasi Cipayung Kota Jayapura (PMKRI, HMI dan GMKI) melakukan aksi 1000 lilin untuk Deiyai, Selasa (8 Agustus), aksi foto ops, bakar lilin dan konferensi pers yang dilakukan oleh berbagai organisasi (LSM, Gereja dan Mahasiswa) yang tergabung di dalam Organisasi Save Our Soul (SOS) pada 9 dan 10 Agustus di Kota Jayapura, pembakaran lilin yang dilakukan oleh solidaritas masyarakat sipil di Wamena (5 Agustus) dan komunitas filmmakers Papua Voicesdi Merauke (8

⁷Pernyataan Bupati Deiyai ketika bersama Ketua tim Mabes Polri dan Komnas HAM melihat selongsongan peluru yang digunakan pada saat penembakan di Waghete. Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-8565-bupati-deiyai-hukum-berat-pelaku-penembakan.html>

⁸Bdk. <http://tabloidjubi.com/artikel-8452-dpr-papua-akan-kirim-tim-investigasi-ke-deiyai.html>

⁹Bdk. Surat DPRD Deiyai ke Kapolda Papua.

Agustus), Mahasiswa Papua di Bogor (11 Agustus), pembakaran lilin dan demo damai oleh mahasiswa di Tanah Jawa¹⁰ di Jakarta (12 Agustus), Mahasiswa USTJ (16 Agustus) dan akhirnya di wilayah kejadian, Masyarakat Deiyai melakukan aksi demo damai ke Kantor DPRD Deiyai (21 Agustus) .

- Isi pada teks banner-banner yang dibawa serta berbunyi sebagai berikut:

"Kami diam, kami mati. Kami bicara, kami mati. Kami mati, kalian diam. Tolong jangan menipu kami. Kasus Paniai belum selesai, kasus Deiyai muncul, tidak tahu setelah ini kejadian di mana lagi. Tolong ini dimasukkan dalam rekomendasi sidang paripurna DPRP. Kalau tidak bisa pakai proses hukum, pakai sistem adat¹¹"

- Keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Deiyai untuk mencabut izin beroperasi PT Putra Dewa Paniai dan untuk mengakhiri kehadiran Brimob di wilayah Deiyai. Keputusan ini yang diambil pada tanggal 23 Agustus 2017, sedangkan sidang paripurna ini juga dihadiri pihak aparat keamanan dan sejumlah wakil masyarakat biasa.

"Ini sudah kenyataan, kita sama-sama tolak (usir) perusahaan Dewa dan Brimob dari Deiyai. Saya minta kita semua tetap jaga keamanan di antara kita bersama¹²"

D. Tanggapan Negara

- Di tingkat nasional Komnas HAM RI menggerakkan timnya untuk melakukan investigasi dan memberikan tanggapannya. Komisioner Komnas HAM RI yang juga adalah anak Mee Pago Natalius Pigai pada 10 Agustus 2017, ketika menemui korban dan keluarga korban berharap agar kasus ini dapat diselesaikan. Mereka berjanji akan terus mengawal proses hukum sampai tuntasnya kasus penembakan tersebut. Masih seputar Komnas HAM RI, salah satu Komisionernya Manager Nasution mengajak pihak kepolisian untuk segera mengusut kasus penembakan tersebut secara profesional dan independen. Selain berharap kepada pihak kepolisian, Manager Nasution mendesak Kepala Negara RI Presiden Joko Widodo agar memimpin langsung penyelesaian kasus tersebut.

"Presiden Jokowi sebaiknya bergegaslah memimpin penyelesaian masalah-masalah Papua. Sekali lagi bersegeralah sebelum terlambat. Masalah-masalah Papua sudah mendekati Maghrib. Sejarah NKRI di tanah Papua menuntut bukti. Semoga masih ada waktu¹³"

- Mendahului penilaian oleh KOMNAS HAM yang berkompeten untuk menentukan apakah kejadian di Deiyai dapat dikategorikan secara resmi sebagai 'pelanggaran HAM', Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, Jendral Wiranto, menyatakan bahwa kejadian di Deiyai adalah suatu tindakan kriminal melulu, bukan

¹⁰Pada 8 Agustus massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Deiyai melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta. Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170808130721-20-233232/warga-papua-demo-tuntut-penuntasan-kasus-deiyai/>

¹¹Ungkapan yang disampaikan oleh salah satu masa aksi damai, Arnold Kobogau, di Kantor DPR Papua, 8 Agustus 2017. Bdk. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-8541-dprp-didesak-bantu-tuntaskan-kasus-penembakan-di-deiyai.html>

¹²Pernyataan yang disampaikan oleh Bupati Deiyai pada penandatanganan kesepakatan, lihat. <http://tabloidjubi.com/m/artikel-9033-akhirnya-bupati-dan-dprd-deiyai-sepakat-usir-perusahaan-dewa-dan-brimob.html>

¹³Ungkapan yang disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM RI Manager Nasution dalam siaran persnya pada tanggal 3 Agustus 2017. Bdk. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/08/03/ou3h7c396-komnas-ham-usut-kasus-penembakan-di-deiyai>

suatu pelanggaran HAM. Sudah tentu pernyataan ini diberikan tanggapan sangat kritis oleh banyak pihak masyarakat dan menolak pendapat tersebut.

"Ada orang tenggelam minta tolong, enggak ditolong kemudian mati, ngamuk, polisi datang meleraikan, kemudian polisi diserang, nembak, enggak direncanakan." Bukan pelanggaran HAM berat, padahal itu kriminal, tindak pidana biasa, yang nembak itu dihukum, selesai sebenarnya¹⁴"

- Selain itu di dalam pidato kenegaraannya pada 14 Agustus 2017, Presiden RI Ir. Joko Widodo hanya menyinggung kejadian Tolikara (17 Juli 2015). Namun patut diapresiasi bahwa Presiden Joko Widodo ada niat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.

"Secara khusus saya ingin memberikan perhatian kepada tanah Papua. Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua dan menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Kerusakan seperti kasus Tolikara, seharusnya tidak terjadi lagi di masa depan. Pemerintah memberikan akses bagi wartawan asing untuk masuk dan meliput di Papua. Pemerintah juga berkomitmen untuk melindungi masyarakat adat yang menghadapi konflik agraria.....serta membentuk komite rekonsiliasi untuk pelanggaran HAM berat. Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu¹⁵"

- Belum ada pejabat publik Papua yang berada di Senayan Jakarta yang angkat bicara terkait penembakan tersebut. Para utusan atau wakil Rakyat dari Papua yang duduk di DPR RI belum bersuara untuk kasus tersebut.
- Sedangkan dari Pihak PT Putra Dewa Paniai yang diwakili oleh Managernya Aldy Layuk Tamanan, Selasa (29 Agustus 2017) mengatakan bahwa sejak keputusan dari rapat paripurna terbuka oleh DPRD Deiyai bersama Bupati dan Pihak Polres Paniai pada 23 Agustus 2017, PT Putra Dewa Paniai tidak beroperasi lagi.

"Setelah ada keputusan dari DPRD dan Bupati itu kami sudah tidak beroperasi, kami sudah tidak kerja lagi di Deiyai"

E. Penyebaran informasi ke Komunitas Internasional

Informasi penembakan itu bukan menjadi bahan diskusi dan pernyataan di tingkat lokal dan nasional tetapi menjadi topik hangat pada kurung waktu seminggu di ruang internasional.

Semuanya mengkritik apa yang telah terjadi di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai. Selain itu dunia internasional mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua.

Beberapa link berita luar negeri yang memberitakan kejadiannya di Kampung Oneibo, Deiyai seperti:

- Negara Amerika Serikat (Daily News, abcnews.go.com),
- Qatar (<http://www.qatar-tribune.com/news-details>),

¹⁴Pendapat Menkopolkum RI Wiranto menanggapi kasus penembakan di Deiyai, lihat.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170811204901-20-234150/wiranto-penembakan-di-deiyai-bukan-pelanggaran-ham/>

¹⁵Isi pidato Presiden RI Joko Widodo pada 14 Agustus 2017, lihat. <http://news.liputan6.com/read/2293713/isi-lengkap-pidato-kenegaraan-perdana-presiden-jokowi>

- India (<https://www.google.co.id/amp/s/www.outlookindia.com>),
- Mesir (<http://www.voiceofalexandria.com>),
- Kanada (<http://m.metronews.ca/#/article/news>).

F. Proses Hukum Bagi Pelaku

Setelah tekanan melalui aksi demo dan berbagai pernyataan, akhirnya para pelaku penembakan diproses secara hukum. Berbagai kalangan menghendaki agar para pelaku diproses seberatnya tetapi dari pihak kepolisian pelakunya dihukum dengan meminta permohonan maaf dan dipindahtugaskan. Keempat pelaku itu adalah Mantan Kapolsek Tigi Iptu Maing Raini, Komdan Pleton Brimob Iptu Aslam Djafar bersama dua anggotanya Ajun Inspektur Dua Esra Sattun dan Brigadir Kepala Viktor Mangaprouw. Keputusan ini berdasarkan sidang kode etik kemiliteran. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Mustofa pada Rabu (30/8)¹⁶, keempat anggota tersebut dijatuhi vonis kewajiban meminta maaf secara lisan di Hadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda.

“Hasil sidang etik, empat orang dinyatakan bersalah dan sebagai perbuatan tercela. Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri wajib menjalankan tugas secara profesional. Setiap anggota Polri dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian”

Bagian III: Uraian singkat serta rekomendasi sebagai suara SKPKC

Sesuai dengan visi dan misinya SKPKC bergabung dengan bulat hati dengan segala pihak yang mengecam pemakaian kekerasan sebagai jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Khususnya di Papua seruan untuk menghargai martabat setiap orang telah berbunyi selama bertahun-tahun dan awal tahun 2000-an dirumuskan dalam pegangan kita bersama: “Papua, Tanah Damai”. Ternyata perwujudan isi semboyan ini masih jauh dari



kenyataan pada tahun 2017 ini.

Sambil memperhatikan konteks kejadian di Deiyai, SKPKC sangat sepeham dengan apa yang dikemukakan oleh Mantan Direktur SKP Keuskupan Jayapura, Theo van den Broek yang menerangkan konteks kejadian ini sebagai berikut:

“Dalam sejumlah tanggapan atas “kejadian Deiyai” perhatian kita semua ditarik pada sejumlah unsur lain yang sangat penting dan yang akhirnya memungkinkan terjadinya penembakan seperti di Deiyai. Pertama-tama: dalam tanggapan Pater Neles Tebay, Pr maupun dalam tanggapan Gereja Katolik oleh Uskup Keuskupan Timika Mgr. John Philip Saklil, Pr dan dalam tanggapan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Gereja Kingmi kejadian di Deiyai dikaitkan dengan

¹⁶Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170831162855-12-238698/penembakan-di-deiyai-empat-polisi-divonis-minta-maaf/>

kejadian-kejadian sejenisnya yang terjadi di wilayah itu selama tahun-tahun terakhir ini. Jumlah 'kejadian sejenis' sangat banyak. Dengan kata lain 'kejadian Deiyai' bukan suatu 'kasus terisolir', suatu kejadian tersendiri. Ada banyak kejadian yang sifatnya sama, terulang dan menjadi pengalaman pahit masyarakat Papua. Maka, ada sesuatu yang lebih struktural yang perlu diperbaiki kalau mau mengatasi pola kekerasan yang terjadi sampai saat ini. Kedua: dalam segala pelaporan serta tanggapan diangkat suatu kaitan antara kehadiran perusahaan dan praktiknya yang mengandalkan aparat keamanan demi kepentingannya. Kaitan antara investor/perusahaan dan 'aparat keamanan' sudah cukup lama diangkat sebagai suatu persoalan yang sangat serius dan menghasilkan suatu peningkatan pelanggaran HAM di Papua secara nyata. Bukan saja di Deiyai, namun sama persoalannya di Merauke, Nabire dan pelbagai wilayah lain dimana investor cenderung bersandar pada pihak keamanan dan sebaliknya. Ketiga: suatu unsur yang tidak kalah pentingnya adalah penilaian terhadap pimpinan pemerintah sipil yang ternyata kurang berfungsi di sejumlah wilayah di Papua karena tidak hadir di tempat, karena kurang mampu dan/ atau sudah terikat pada kepentingan pihak lain. Selain itu, dinilai lebih sibuk memperjuangkan 'kursinya' pada pemilihan berikut daripada melayani masyarakatnya. Terutama dalam tanggapan pimpinan Gereja Kingmi Pdt. Beny Giyai unsur ini sangat ditonjolkan. Kelesuhan dan kelumpuhan di tingkat pemerintah sipil menyediakan ruangan seluas-luasnya bagi aparat keamanan untuk bertindak tanpa diawasi dan diarahkan. Keempat: dalam setiap demo/aksi damai berkaitan dengan kejadian di Deiyai, ungkapan utama berbunyi seperti 'kami ditembak saja seakan tidak ada harga', 'kami diam ditembak mati, kami bicara ditembak mati', 'kami orang Papua dilahirkan untuk ditembak mati?'. Sudah tentu orang Papua asli merasa – dengan alasan yang kuat - bahwa mereka tidak dihargai, tidak diakui, apalagi diterima sebagai orang semartabat dengan warga manapun di Indonesia. Orang Asli Papua juga tidak diakui sebagai 'tuan rumah' di Papua. Dengan memperhatikan keempat unsur struktural di atas ini sudah menjadi jelas bahwa tidak begitu mudah untuk menyelesaikan 'kasus Deiyai' karena kasus itu bukan suatu insiden tersendiri, namun suatu gejala dalam pola kebijakan umum yang turut ditentukan oleh keempat unsur yang disebutkan diatas. Dengan kata lain, kita menghadapi suatu masalah struktural yang juga hanya dapat diselesaikan secara struktural"¹⁷.

Sudah tentu penyelesaian kasus Deiyai mengandaikan suatu penyelesaian yang lingkupnya jauh lebih luas daripada insiden di salah satu lokasi saja. Kita semua diharapkan dengan mengandalkan peranan serta kedudukan masing-masing untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut beberapa aspek rekomendasi yang ingin SKPKC Fransiskan Papua tawarkan:

Rekomendasi – Saran – Seruan:

1. Segala pihak perlu memperhatikan dengan saksama penyelesaian secara hukum kasus Deiyai sebagai salah satu kasus pelanggaran yang berat. Kita semua diajak untuk menilai sejauh mana hukuman yang diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan. Hanya dengan mengambil sikap kritis ini mungkin kita dapat mengakhiri 'kekebalan hukum' (impunitas) pihak-pihak tertentu yang sudah terlalu lama menjadi kenyataan di Papua ini.
2. Kasus Deiyai juga menarik perhatian pada peranan Pemerintah setempat yang sering sangat mengecewakan masyarakat. Sangat diharapkan segala komponen pemerintah setempat mulai menyadari dampak negatifnya sikap kelalaian dan kemasabodohan terhadap kesusahan yang dialami masyarakat. Dalam kerangka ini

¹⁷Tulisan Theo van den Broek, lihat. <http://tabloidjubi.com/artikel-8650-kasus-deiyai-papua-penyelesaiannya-tidak-terbatas-pada-hukuman-pelakunya.html> dan <http://fransiskanpapua.org/2017/08/15/kasus-deiyai-penyelesaiannya-tidak-terbatas-pada-hukuman-pelakunya/>

pun hubungan kerja dengan para investor perlu dievaluasi sejauh pemerintah betul memihak pada kepentingan rakyat atau lebih memihak pada perusahaan yang serte merta mengandalkan aparat keamanan dalam pengamanan operasional perusahaannya.

3. Gereja-Gereja (PGGP) - juga segala lembaga yang tergabung dalam FKUB - diajak untuk mengembangkan suatu pola pastoral dimana kenyataan konkrit masyarakat dijadikan titik tolak pewartaannya. Suatu pola pastoral yang menjamin pembinaan umat, termasuk para pejabat sehingga segala permasalahan diselesaikan dengan tidak memakai kekerasan atau kuasa berlebih-lebihan. Berdasarkan pola pastoral kontekstual itu diharapkan juga Gereja-Gereja/lembaga-lembaga keagamaan akan bersuara setiap saat ketika martabat anggota masyarakat/umatnya diinjak. Kepedulian tersebut adalah bagian sejati dari misi / peran kenabian Gereja/Agama.
4. Kasus Deiyai juga dapat membantu Pemerintah Pusat untuk akhirnya mendengar suara rakyat yang sudah begitu sering menyatakan bahwa bukan ekonominya masalah utama di Papua, melainkan penghargaan atas martabatnya dan pengakuan atas hak-haknya. Pemerintah Pusat diharapkan membuka diri untuk mengakui masalah di Papua yang sebenarnya dan mencari solusi yang tepat sehingga tidak memakai pendekatan pengamanan atau pemakaian kekerasan.
5. Kasus Deiyai sekali lagi dapat menyadarkan segala pihak, termasuk juga komunitas penduduk Papua yang bukan orang asli, bahwa sudah tidak dapat tertunda lagi untuk mencari secara aktif suatu bentuk tepat untuk saling bertemu dan mengangkat permasalahan di Papua melalui suatu dialog yang terbuka. Suatu dialog yang tidak dihalangi oleh suatu 'mentalitas harga mati' pihak manapun. Semboyan "Papua Tanah Damai", perlu dikaji kembali dan diterjemahkan bersama dalam suatu konsep operasional guna mewujudkan suatu 'kebudayaan damai' di Papua. Dalam konsep operasional ini roadmap yang dikembangkan LIPI dapat dimanfaatkan dan segala pihak diajak untuk mengakui dan mengandalkan peranan penting United Liberation Movement West Papua (ULMWP) sebagai suatu perwakilan bangsa Papua yang diakui masyarakat yang adalah pemangku kepentingan utama.

Penutup

Semoga laporan dan catatan refleksi ini bermanfaat bagi kita pada penyelesaian permasalahan di Papua. Bukan saja kasus Deiyai perlu diselesaikan dengan tepat, namun perlu disusuli upaya yang sejati untuk mengubah konteks kemasyarakatan yang telah memungkinkan kasus di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai.

Sentani, 30 Agustus 2017

Tim SKPKC Fransiskan Papua

**Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
(Office for Justice, Peace and Integrity of Creation)**

=====

FRANSISKAN PAPUA
KOTAK POS 237
SENTANI 99352
PAPUA, INDONESIA

FRANSISCANS OF PAPUA
Tel: +62 – 967 – 519 1510
Fax: +62 – 967 – 519 1510
E-mail: skpkc2010@gmail.com
Website: www.fransiskanpapua.org

